

KETIDAKBERPIHAKAN JARGON POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Rosida Tiurma Manurung

Email: rosidatm@gmail.com

Abstract

It has become a reality that a woman is the second class citizen in the society. The role of the woman had not been counted on. In the field of education, economics, social, religious conviction, also politics, woman has always been gazed at an eye. Furthermore, the woman is the creature who has always been set aside in the world of politics. In the matter of political jargon, the woman did not get the place, did not have the right, and her role was stunted.

Development of political jargon today really does not take sides with the woman. Jargon like "a leader must be man", "woman might be apolitical", "woman is only served man", "man is the head, the woman is only a follower", "woman has really become polished in the political campaign", "woman is only as the political colleague", "women is only behind the screen", "women should not dared to entered political field that belongs to the man", "women is only as the implementation and the commodity of activism", "woman became the display window of political views", "women is only as a jack up voice", "woman was made bait in political negotiations", and much other political jargon that very much insulted and stunted the female capacity in the political field.

Keyword: jargon politik, ketidakberpihakan terhadap perempuan, dominasi laki-laki

I. Jargon sebagai Kekuatan Bahasa dalam Politik

1.1 Bahasa sebagai Suatu Kekuatan Politik

Tidak dapat diragukan bahwa di bidang politik bahasa sangat memegang peranan. Bahasa dijadikan alat untuk melakukan aktivitas politik. Bahasa merupakan alat untuk mewujudkan impian politik. Bahasa pun dijadikan sarana untuk membujuk simpatisan

Universitas Kristen Maranatha Bandung

melalui janji-janji politik. Kekuatan bahasa tidak terkira. Dengan bahasa, orang dapat membungkam lawan politiknya. Bahasa dapat mengubah opini publik terhadap suatu masalah. Bahasa pun dapat membujuk dan meyakinkan khalayak terhadap suatu argumen politik. Melalui pendekatan bahasa, seseorang dapat dijadikan pendukung setia suatu partai politik. Kekuatan bahasa telah mampu mendongkrak popularitas dan mengubah *image* seorang politikus. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa telah merasuki dunia

politik kita. Bahasa senantiasa berdenyut dan berhembus dalam setiap nafas politik di Indonesia. Jargon politik merupakan salah satu alat bahasa untuk berpolitik.

1.2 Pengertian Jargon

Menurut KBBI (Alwi et.al, 2003), yang disebut jargon adalah kosakata khusus yang dipergunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Hari-murti Kridalaksana (2008: 98) dalam *Kamus Linguistik* menyatakan bahwa jargon adalah kosakata yang khas yang dipakai dalam bidang kehidupan tertentu, seperti yang dipakai oleh montir-montir mobil, tukang kayu, guru bahasa, dan sebagainya yang tidak dipakai dan sering tidak dipahami oleh orang dari bidang lain. Dalam *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Endarmoko, 2006), jargon disebut juga patois, slang, atau slogan.

1.3 Jargon untuk Kepentingan Politik

Jargon dalam bidang politik sengaja diciptakan, dikreasikan, dan ditiupkan sebagai senjata untuk kepentingan pihak tertentu. Ada ungkapan politik di gunakan untuk menampilkan *image* positif, misalnya jargon politik SBY "*katakan TIDAK untuk Korupsi*", sengaja diciptakan untuk menampilkan wajah pemerintahan yang sehat dan bersih dari korupsi. Di lain pihak, untuk meraih simpati wong cilik, Megawati meneriakkan jargon politik "*Perjuangkan sembako murah*". Pada pilkada lalu, kubu Fauzi Bowo menggunakan jargon politik yang bersifat ikonis (*iconic*) yaitu jargon yang khusus berkaitan dengan gambaran langsung yang bertalian de-

ngan sesuatu yang digambarkan, jargonnya ialah "*Coblos kumisnya*". Jadi, jika kita ingat kumis, kita pasti ingat Fauzi (ikon *kumis* untuk menggantikan Fauzi). Sebuah jargon politik dibuat sedemikian rupa agar dapat menyihir publik, juga ada jargon politik yang bersifat bujukan seperti halnya sebuah iklan.

Akan tetapi, ada pula jargon politik yang bersifat sinisme dan diskriminatif. Merupakan sebuah kenyataan, banyak jargon politik yang tidak berpihak kepada perempuan. Dalam tulisan ini, akan dibahas jargon-jargon politik yang memojokkan dan tidak menguntungkan bahkan melecehkan harkat dan derajat perempuan.

II. Jargon Politik yang Tidak Berpihak kepada Perempuan

Berikut ini, akan dibahas jargon-jargon politik yang menyudutkan dan meminggirkan perempuan di Indonesia.

a. "*Pemimpin harus Laki-laki*"

Jargon "*pemimpin harus laki-laki*" sangat terasa di dunia politik. Hal ini dapat dilihat dari lima calon gubernur (Cagub) Jatim yang bertanding pada Pilgub Jatim 23 Juli 2008, cuma ada satu calon perempuan yaitu Khofifah Indar Parawansa. Selebihnya calon-calon laki-laki, mulai dari Soekarwo, Soenarjo, Achmady, sampai Sutjipto. Dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi pemimpin partai politik di Indonesia sangat minim. Dilihat dari tingkat keterwakilan perempuan yang memimpin departemen dalam Kabinet SBY pun jauh dari harapan yaitu hanya 4 orang. Juga, secara global, representasi perempuan di dunia di bidang politik sangat

rendah. Terbukti di 100 negara, laki-lakilah yang dominan menduduki hampir seluruh posisi kepemimpinan dalam pemerintahan. Demikian juga, dari 150 negara anggota PBB, hanya 6 negara yang memiliki pemimpin eksekutif tertinggi berjenis kelamin perempuan. Kondisi tersebut makin diperkuat dengan adanya jargon "laki-laki itu kepala, perempuan hanya sebagai pengekor".

Pada kenyataannya, keunggulan perempuan dalam hal memimpin tidak perlu disangsikan. Banyak perempuan justru lebih mampu memimpin dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, perempuan memiliki kelebihan untuk berpikir dan bernalar jauh ke depan. Perempuan pun memimpin dengan hati karena tidak dapat dipungkiri intuisi (gerakan hati) perempuan lebih peka dan lebih bisa diandalkan dibandingkan dengan laki-laki sehingga hasilnya lebih optimal. Perempuan pun memiliki daya tahan untuk merasakan penderitaan lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan pun memiliki nyali yang kuat. Di balik nama besar pemimpin laki-laki, justru ada perempuan-perempuan yang memegang peranan. Sungguh ironis, melihat jumlah perempuan yang lebih dominan di Indonesia (lebih dari 100 juta jiwa), tetapi yang menjadi pemimpin justru laki-laki. Boleh jadi, keironisan ini terjadi karena ada ketakutan dari laki-laki jika perempuan menjadi pemimpin. Oleh karena, *daya kepemimpinan* perempuan dibentuk dan didasari oleh *care* (kepedulian) yang dipenuhi oleh atmosfer kasih sayang yang natural.

b. "Perempuan Tidak Perlu Berpolitik"

Dalam jargon politik ini, digambarkan dunia politik merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki dan disentuh perempuan. Dunia politik adalah dunia milik laki-laki yang cara pandangannya selalu maskulin. Perempuan tidak perlu terjun ke kancah politik karena politik itu kotor. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut dianggap tidak cocok berada di zona politik yang penuh intrik dan dipenuhi oleh aroma "kecurangan", konspirasi, persekongkolan, dan hal-hal yang kejam.

Hal di ataslah yang mengakibatkan perempuan diwanti-wanti jangan berani-berani memasuki wilayah politik. Konstruksi demikian yang mengakibatkan kaum perempuan yang terjun ke bidang politik masih dapat dihitung dengan jari. Akibat jargon politik di atas, kaum laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan karena mereka mendominasi wilayah politik di Indonesia. Padahal, kesempatan perempuan berpolitik dan duduk menjadi anggota legislatif semakin terbuka manakala dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu yang pada Pasal 65 Ayat 1 mencantumkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 30%. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika jargon "perempuan tidak perlu perlu ber-politik" diubah menjadi "wahai perempuan, ayo berpolitik".

c. "Tugas Perempuan itu Melayani Laki-laki"

Jargon "tugas perempuan itu melayani laki-laki" sungguh sangat dangkal, diskriminatif, dan berkesan

primitif. Pada era yang modern dan canggih ini, jargon tersebut sudah sangat usang dan kuno. Konstruksi sosial yang menyatakan bahwa perempuan itu tugasnya melayani suami dan mengurus anak telah terpatri selama berabad-abad. Konstruksi itu tercipta karena adanya budaya patriarki (= "aturan laki-laki" atau "prinsip dominasi laki-laki atas perempuan") di Indonesia. Jargon itu diuntungkan dengan alasan melayani laki-laki adalah kodratnya perempuan. Pada hakikatnya, tugas melayani tidak memedulikan gender. Perempuan bukan hanya melayani, tetapi suatu saat boleh dilayani laki-laki. Sering muncul jargon "*istri yang baik adalah istri yang melayani suaminya*", tetapi bisakah dan lazimkah keadaannya jika dibalik bahwa "*suami yang baik adalah suami yang melayani istrinya*"?

Dalam kancah politik, keterlibatan perempuan hanya sebatas "menuliskan agenda harian", "membuatkan kopi", "mengetikkan konsep", "memesan makanan", "menjadi operator telepon", atau bahkan "membawakan pakaian ke *laundry*" kesemua tugas itu diperuntukkan bagi kepentingan politikus laki-laki. Dengan demikian, peranan perempuan di bidang politik memang "hanya menjadi pelayan laki-laki". Kedudukan perempuan di kancah politik semestinya harus diubah. Perempuan harus berani bersaing untuk menduduki posisi penting sehingga tidak perlu mengerjakan pekerjaan seperti seorang pelayan/ pesuruh. Perempuan harus berubah peran sebagai pengambil keputusan dan bukan sebagai pelaksana keputusan. Jangan ada lagi perempuan yang dijadikan budak/ pelayan politik, tetapi perempuan harus menjadi pelaku politik.

d. "Perempuan sebagai Perhiasan Politik"

Di bidang politik, perempuan tidak ubahnya seperti perhiasan yang ditata dan dipajang untuk menarik perhatian. Perempuan hanya sekadar dijadikan alat atau aksesori politik agar terlihat gemerlap. Contohnya, saat kampanye, perempuan-perempuan yang cantik dan seksi (kebanyakan artis dan selebritis) dipilih untuk menjadi pajangan dan penambah gairah serta semarak kampanye sehingga dapat mendongkrak peraihan suara khususnya dari pemilih kaum muda.

Dalam parlemen, perempuan hanya sebatas pajangan untuk menunjukkan adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Disebut sebagai pajangan, karena perempuan di parlemen hanya sebatas untuk memenuhi kuorum dalam *voting*, tetapi perempuan tidak memegang peranan yang lebih besar, misalnya, berperan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

e. "Perempuan sebagai Komoditas Politik"

Perempuan di bidang politik dianggap sebagai komoditas atau barang dagangan. Jargon politik itu muncul karena perempuan diposisikan sebagai komoditas penarik perhatian yang diperlakukan seperti barang dagangan yang diiklankan. Maksudnya, figur perempuan dikemas indah dan menarik untuk dijadikan jualan politik. Tubuh perempuan dieksploitasi dan dijadikan komoditas tangguh untuk menjerat pemilih laki-laki. Perempuan dicitrakan sebagai sosok yang indah secara fisik, tetapi tanpa otak. Justru kondisi itu sangat merendahkan derajat perempuan.

Perempuan disebut barang yang jika tidak laku lagi dijual akan dikegudangkan atau bahkan dilenyapkan. Sungguh suatu tindakan keji dan tidak termaafkan jika perempuan dipajang di etalase dan diberi bandrol harga.

f. "Perempuan sebagai Objek"

Perempuan dianggap objek semata yang nilai dan perannya dinisbikan. Perempuan sebagai objek merupakan warisan kultur, budaya, dan sistem patrilineal yang ada pada bangsa-bangsa di seluruh permukaan dunia. Perempuan sebagai objek terjadi karena perempuan dianggap sebagai warga kelas dua, atau bahkan warga kelas tiga di bawah laki-laki. Jelaslah, posisi itu menyebabkan perempuan menjadi pihak yang terkalahkan atau pihak yang dipersalahkan. Jadilah perempuan sebagai objek untuk pemuas hasrat duniawi laki-laki.

Dalam bidang politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam negosiasi politik sering di samping uang, perempuan pun menjadi iming-iming untuk mencapai kesepakatan politik. Perempuan dijadikan objek pemuas seks para politikus yang moralnya bobrok. Pencitraan perempuan di benak laki-laki hanya melulu sebagai simbol seks. Fantasi laki-laki atas perempuan selalu sebagai objek pemuas. Laki-laki tidak pernah menganggap perempuan sebagai mitra atau teman sekerja.

Dalam bidang politik, perempuan dianggap objek, terbukti dengan adanya UU Antipornografi dan Pornoaksi yang tidak berpikah kepada perempuan, yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan, yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek yang dapat menggoda birahi laki-laki. Tubuh pe-

rempuan dianggap material yang diimajinasikan dan dikonstruksikan untuk kepentingan laki-laki. Karena adanya jargon perempuan sebagai objek, tingkat perkosaan, pelecehan, dan perdagangan perempuan semakin tinggi dan menjadi-jadi. Sudah menjadi tugas kita sebagai perempuan untuk melindungi perempuan dengan cara menjadi "subjek yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender".

g. "Dunia Politik, Dunianya Maskulin"

Aroma maskulin amat terasa di dunia politik. Perempuan tidak diikutsertakan dalam dunia politik. Pendekatan *malestream* (aliran laki-laki) sangat merasuk dunia politik. Ide-ide maskulin tentang apa dan siapa yang boleh memasuki dunia politik serta aturan-aturan apa dan yang bagaimana yang boleh ada semuanya dibuat untuk kepentingan dan senantiasa menguntungkan laki-laki.

Jargon "dunia politik, dunianya maskulin" merupakan upaya untuk memarjinalisasikan perempuan di ranah dan ruang politik. Agresivitas maskulin di dunia politik telah mengakibatkan sempitnya ruang gerak perempuan dan semakin terpojoknya perempuan dalam arena politik. Perempuan harus segera mengambil sikap untuk mengambil kesempatan menduduki posisi dalam politik. Perempuan dapat menggalang solidaritas dengan membuat pernyataan-pernyataan politik yang dapat menekan penguasa untuk memberikan dan mendukung perempuan masuk dalam dunia politik. Pendekatan kultural pun dapat dilakukan agar masyarakat membuka hati dan membuka mata bahwa jargon

yang telah terkonsep dan merugikan perempuan itu dapat dihapus dalam pola pikir mereka. Sudah saatnya jargon "dunia politik, dunianya maskulin" kita ubah menjadi "dunia politik, dunia yang ramah kepada perempuan".

h. "Perempuan Itu Tidak Vokal"

Vokalisasi perempuan di dunia politik hanya terdengar sayup-sayup. Suara perempuan tidak memberi warna dalam percaturan politik. Perempuan cenderung tidak vokal, dalam artian tidak memainkan peranan penting di ranah kehidupan berpolitik.

Perempuan kurang nyaring suaranya di dunia politik karena terkondisikan oleh gerak perempuan dalam kehidupan berpolitik yang dibatasi dan telah terpolakan. Pada dasarnya, perempuan cenderung menghindari "wilayah rawan" dan "wilayah penuh risiko". Hal demikian terjadi karena perempuan terjebak oleh budaya politik yang memihak laki-laki.

Perempuan di Indonesia harus menyadari perlunya pemberdayaan perempuan di arena politik dengan mulai lantang dan vokal menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, memunculkan isu-isu perempuan, dan melawan penindasan dan diskriminasi perempuan. Perempuan harus keluar dari kotak jebakan politik untuk kepentingan sesaat dan harus segera melenggang menuju dunia politik yang berwawasan lebih luas dan integral semata-mata demi pemberdayaan perempuan dan pengakomodasian aspirasi perempuan. Gaung suara perempuan dikancah politik selalu diharapkan, asalkan suara tersebut berasal dari hati nurani yang

tidak tercemar oleh kepentingan pribadi dan golongan.

III. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

1. Adanya dominasi laki-laki dalam bidang kepemimpinan di lembaga pemerintahan dan politik.
2. Perempuan dianggap tidak cocok terjun ke dunia politik yang kotor dan penuh intrik.
3. Perempuan dijadikan budak/ pelayan politik.
4. Perempuan dijadikan aksesori atau perhiasan politik.
5. Perempuan dijadikan barang dagangan politik.
6. Perempuan dijadikan objek yang dikonstruksikan dan diimajinasikan untuk kepentingan laki-laki.
7. Terjadinya agresivitas laki-laki di dunia politik yang telah meminggirkan perempuan.
8. Perempuan tidak vokal di dunia politik karena terjebak budaya politik yang memihak laki-laki.
9. Perlu diupayakan pemberdayaan wanita di bidang politik.
10. Perlu ditiupkan dan disosialisasikan jargon atau ungkapan politik yang memihak dan yang ramah terhadap perempuan di Indonesia.

IV. Daftar Pustaka

Alwi, Hasan et al. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: Balai Pustaka.

Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Barnes, Melanie. 2004. *Bahasa dan Politik: Wacana Politik dan Plesetan*. Universitas Muhammadiyah Malang: FISIP.

Endarmoko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.

Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. *Politik dan Wanita*. Depok: Koekoesan.